

Analisis Money Politic Dalam Penerapan Demokrasi Pancasila pada Pemilu di Desa Selakkar Kabupaten Karo

M Fadly¹ Veronika Vransiska br Tarigan² Arya Sandro Simanjorang³ Hizkia Natanael Simatupang⁴ Jujur Marholong Purba⁵ Jamaludin⁶

Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: m.fadlyy27@gmail.com¹ veronikatarigan25@gmail.com²
aryasandrosimanjorang@gmail.com³ hizkiansimatupang0@gmail.com⁴
jujurpurba6@gmail.com⁵ Jamaludin@unimed.ac.id⁶

Abstrak

Pemilu adalah suatu proses untuk melahirkan pemimpin yang adil, berintegritas, mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Secara konseptual, pemilu adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terjadinya Tindakan money politic pada saat berlangsungnya pemilu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Hasil dari penelitian ini ditemukannya budaya money politic yang dilakukan oleh para partai politik secara berkepanjangan sehingga masyarakat menanggapi hal ini adalah bentuk dari kebiasaan. Oleh karena itu, hendaknya para partai politik melakukan proses kampanye secara transparan agar proses pemilu berlangsung dengan baik dan Masyarakat memilih sesuai dengan yang mereka inginkan.

Kata Kunci: Money Politic, Pemilu, Demokrasi Pancasila

Abstract

Election is a process to produce a fair leader, integrity, prioritizing the interests and welfare of the community. Conceptually, election is a means of realizing the sovereignty of the people. This study aims to analyze the occurrence of money politics during the election. The research method used in this study is qualitative with a case study research design. The results of this study found a culture of money politics carried out by political parties for a long time so that the community responded to this as a form of habit. Therefore, political parties should carry out the campaign process transparently so that the election process runs well and the community chooses according to what they want.

Keywords: Election, Money Politic, Pancasila Democracy



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia resmi mendeklarasikan diri sebagai negara hukum demokratis sejak kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Yang dimana segala sesuatu harus diatur secara demokratis dengan undang undang, dan harus dikehendaki oleh rakyat. Dengan dinyatakannya Indonesia sebagai negara hukum dengan sistem demokrasi, maka segala kekuasaan yang ada harus berdasarkan pada konstitusi negara. Ketika demokrasi didirikan maka segala sesuatu dilakukan oleh rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Keberadaan negara demokrasi di Indonesia diatur dalam Pembukaan UUD 1945. Beberapa ketentuan tersebut dapat secara langsung menampakkan karakter demokratisnya, namun ada pula yang masih netral, sehingga sifat demokratisnya masih sangat tergantung pada kebijakan politik yang ada. Dalam Pembukaan ayat 4 UUD 1945 dan ayat 4 Pancasila dirumuskan bahwa "Demokrasi dipimpin oleh kearifan dalam musyawarah atau representasi". Dengan demikian, demokrasi Pancasila adalah demokrasi musyawarah. Demokrasi yang baik didasarkan pada prinsip jujur dan adil. Namun dalam implementasinya dalam demokrasi seringkali terdapat penyimpangan, salah

satunya adalah terjadinya politik uang dalam Pilkada (Khairazi, 2015). Seorang calon peserta yang ingin berpengaruh dalam Pilkada dengan memberikan imbalan materi dalam upaya memperoleh kekuasaan sebagai pemegang suara proses politik baik milik pribadi dilakukan dengan memberikan imbalan dikenal dengan sebutan politik uang atau money politic. Secara harfiah dapat diartikan bahwa money politik atau politik uang adalah proses tindakan jual beli suara dalam proses perolehan suara masyarakat dengan memberikan imbalan. Proses pilkada akan berjalan dengan baik ketika semua calon peserta Pilkada jujur dan tidak melakukan money politik. Keberadaan money politik dapat menjadi isu yang aktivitas Pilkada (Kumolo, 2015).

Money politic atau politik uang dalam Pilkada akhir-akhir ini menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian publik. Politik uang dilakukan untuk memperoleh suara yang banyak dan menguasai suara dalam Pilkada (Marsudi & Sunarso, 2019; Nabila, Prananingtyas, & Azhar, 2020). Keadaan ini menjadikan terjadinya permasalahan di masyarakat, dimana kepercayaan masyarakat akan politik menjadi melemah. Hal ini ditemukan pada proses pemilu yang terjadi di kabupaten Karo. Berbagai paslon (pasangan calon) yang akan mengajukan diri menjadi pemimpin melakukan kegiatan money politic agar dapat menduduki jabatan yang mereka inginkan. Money politic dianggap sebagai suatu hal yang sudah biasa dan menjadi budaya Masyarakat Ketika menjelang pemilu. Dan sebagaimana Masyarakat menjadikan hal itu sebagai mata pencarian untuk mencari keuntungan. Salah satu penyebab nya juga karena kurangnya pengetahuan Masyarakat terkait suap menyuap dan menganggap bahwa hal itu sebagai pemberian amal. Dengan diadakannya money politic maka sistem demokrasi di Indonesia terkhususnya kabupaten Karo, tidak berjalan dengan semestinya.

Money Politic juga berpotensi membuat perpecahan dalam masyarakat oleh karena kelompok yang terbagi dalam hal dukung-mendukung karena merasa mempunyai rasa balas budi terhadap calon anggota legislatif yang didukung. Money politic juga merupakan suatu tindak pidana yang sudah menjadi budaya dalam politik bernegara yang tidak sehat. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk money politic dalam pemilu dan mengungkapkan sanksi terhadap calon anggota dewan perwakilan daerah yang melakukan money politic. Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih mendalam terkait adanya Tindakan money politic yang terjadi selama proses pemilu terutama di kabupaten Karo. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjelaskan bagaimana money politic terjadi di lingkungan Masyarakat.

METODE PENELITIAN

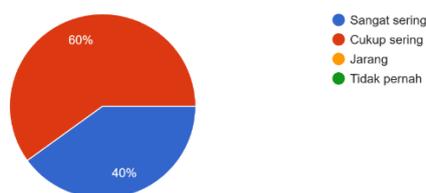
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Lune dan Berg (2017), penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada konsep dan deskripsi suatu peristiwa. Selain itu, penelitian kualitatif dapat meneliti suatu kondisi alamiah dari suatu objek (Sugiyono, 2013). Sementara penelitian deskriptif yaitu penelitian yang mendeskripsikan kemampuan atau persepsi partisipan (Lune & Berg, 2017). Studi kasus adalah sebuah desain penelitian yang berstrategi untuk menginvestigasi fenomena yang ada dalam kehidupan nyata, yang berdasarkan pada teknik dan menambahkan dua sumber bukti yang berasal dari observasi dan juga wawancara. Studi kasus juga disebut sebagai desain investigasi berdasarkan analisa terdalam dari banyaknya area, seperti program, aktivitas, proses, atau satu individu lainnya. Penggunaan studi kasus dalam penelitian ini yaitu untuk menemukan adanya masalah pada daerah yang akan dilakukannya penelitian. Kasus yang ada dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi lengkapnya dengan menggunakan berbagai macam prosedur pengumpulan data pada periode yang

berkelanjutan (Yin, 2015). Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara yang dilakukan secara mendalam. Kuesioner dilakukan agar memperoleh data yang berasal dari warga setempat. Kuesioner dibagikan melalui link google form yang diberikan kepada 10 partisipan dan berisikan pertanyaan yang mengaitkan tentang adanya money politic selama proses pemilihan berlangsung. Wawancara secara mendalam dilakukan setelah kuesioner dilakukan. Pada tahap ini, wawancara dilakukan kepada 5 dari 10 partisipan yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

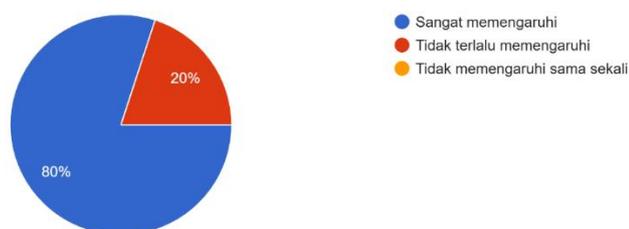
Berdasarkan proses penelitian yang sudah dilakukan, peneliti menemukan bahwasanya selama proses pemilu berlangsung, rerata dari peserta yang ikut pemilu kebanyakan adalah masyarakat dengan rentang usia 18-19 tahun. Hal ini diperoleh dari hasil kuesioner yang telah diberikan kepada 10 partisipan secara acak untuk proses penelitian. Penelitian ini memperoleh hasil terkait adanya kegiatan money politic yang sedang banyak terjadi selama proses pemilu berlangsung. Ditemukan sebanyak 60% dari masyarakat setempat yang menjadi partisipan cukup sering mendengar istilah money politic dan 40% sisanya sangat sering mendengar hal tersebut. Hal ini dapat dilihat dari hasil kuesioner yang diisi oleh para partisipan.

1. Seberapa sering Anda mendengar tentang praktik money politic dalam pemilu di Kabupaten Karo?
10 jawaban



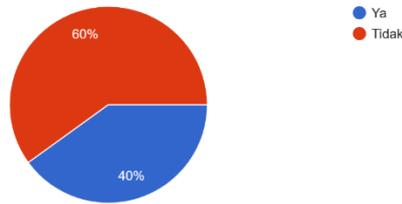
Money politic yang berlangsung pada saat proses pemilu sangatlah memengaruhi hasil suara yang akan diambil. Hal ini terbukti karena dengan adanya hal tersebut, maka masyarakat akan memilih kepada calon pasangan yang memberikan mereka uang agar dipilih menjadi pemenang dalam proses pemilihan yang sedang berlangsung. Dari data yang diperoleh, terdapat 80% dari partisipan yang menyetujui hal ini dan dapat dilihat dari diagram di bawah ini.

2. Menurut Anda, apakah money politic memengaruhi hasil pemilu di Kabupaten Karo?
10 jawaban



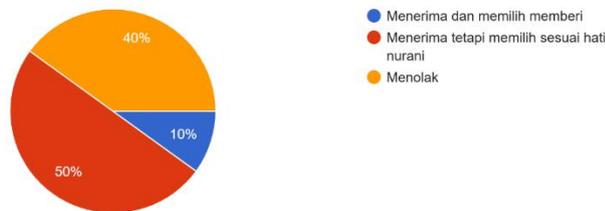
Meskipun diadakannya money politic selama proses pemilu, terdapat 60% dari partisipan yang tidak mengambil uang ataupun barang yang ditawarkan kepada mereka. Adanya wawancara yang dilakukan menguatkan pernyataan bahwasanya Sebagian besar dari masyarakat menyadari bahwa kegiatan tersebut adalah hal yang salah untuk dilakukan. Karena akan berdampak pada masyarakat untuk 5 tahun yang akan datang.

3. Apakah Anda pernah menerima tawaran berupa uang atau barang saat pemilu?
 10 jawaban



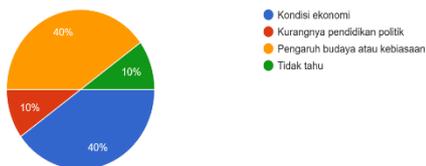
Namun, kesadaran Masyarakat tersebut tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan di lapangan. 50% dari Masyarakat memilih untuk menerima uang ataupun barang yang diberikan, namun memilih sesuai apa yang mereka inginkan. 40% dari partisipan menolak melakukan hal tersebut dan 10% sisanya memilih pasangan calon yang melakukan money politic.

4. Jika pernah, apa yang Anda lakukan terhadap tawaran tersebut?
 10 jawaban

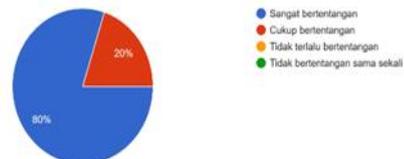


Berdasarkan hasil survey dan wawancara yang telah dilakukan, alasan Masyarakat menerima adanya uang ataupun barang yang diberikan karena terkendala dengan kondisi ekonomi juga pengaruh dari kebiasaan yang ada. Hal ini menyebabkan adanya Tindakan money politic secara berkelanjutan bahkan hingga sekarang.

5. Menurut Anda, apa alasan utama masyarakat menerima money politik?
 10 jawaban

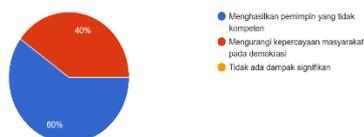


6. Seberapa besar Anda merasa money politik bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila?
 10 jawaban

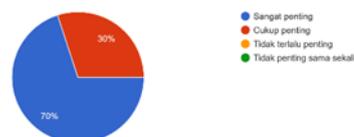


Masyarakat menyadari bahwa hal ini bertentangan dengan Pancasila sebagai landasan dasar dari negara Indonesia. Terdapat 60% dari mereka menyadari bahwasanya hal ini dapat menyebabkan terjadinya pemilihan pemimpin yang tidak berkompeten dalam hasil capaian pemilu. Sehingga mereka berpendapat bahwasanya pendidikan politik untuk mengurangi money politic sangatlah penting untuk mereka. Hal ini bertujuan agar mereka tidak salah dalam memilih pemimpin yang akan mereka pilih.

7. Apa dampak utama money politik terhadap kualitas pemimpin yang terpilih, menurut Anda?
 10 jawaban



8. Seberapa penting Anda merasa pendidikan politik untuk mengurangi praktik money politik?
 10 jawaban



Rendahnya pemahaman mengenai politik dalam kehidupan sehari-hari terkhususnya pada proses pemilu yang berlangsung setiap lima tahun sekali menjadikan Masyarakat sangat mudah dalam menerima uang ataupun barang yang ditawarkan oleh para tim dari pasangan

yang melakukan tindakan money politic. Masyarakat dengan sadar menginginkan adanya pendidikan yang lebih merata dalam hal politik, adanya penegakan hukum yang tegas terkait permasalahan money politic, adanya kampanye yang dilakukan secara transparan dan jujur. Sehingga hal ini akan lebih memudahkan terjadinya proses pemilihan yang jujur dan kondusif serta pemilihan suara sesuai dengan hati masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat memiliki tanggung jawab yang besar untuk menghentikan praktik money politic yang dilakukan oleh para oknum yang terjadi setiap masa pemilu berlangsung.

KESIMPULAN

Praktik money politic yang berlangsung di kabupaten Karo setiap masa pemilu memiliki potensi terjadinya pemilihan pemimpin yang tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, aparat penegak hukum dan para partai politik hendaknya bekerjasama dengan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan kecurangan seperti money politic menjadi budaya yang diteruskan secara berkepanjangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Khairazi, F. (2015). Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 72-94.
- Kumolo, T. (2015). *Politik Hukum Pilkada Serentak*. Jakarta: Expose.
- Lune, H., & Berg, B. L. (2017). *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*, Global Edition. America: Pearson Education Limited.
- Nabila, N., Prananingtyas, P., & Azhar, M. (2020). Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia. *Notarius*, 13 (1), 138-143.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Yin, R. K. (2015). *Qualitative research from dtsrt to finish*. United States of America: Library of Congress Cataliging-in-Publication Data.